

BAB IV

ANALISIS

A. Proses Kiai Melibatkan Santri Dalam Partai

Istilah ulama dan kiai pada dasarnya memiliki konsep dan akar yang berbeda. Ulama lebih merujuk pada bahasa arab. Yaitu dari kata '*alima*' yang berarti orang yang berilmu tinggi, mendalam, dan luas. Istilah ulama lebih bersifat tekstual dan pengertiannya bersumber pada wahyu Allah serta sabda nabi. Kiai adalah sosok penerus para nabi. Kiai dan ulama juga di pergunakan sebagai gelar kehormatan bagi para orang tua. Laki-laki disebut *kiai*, sedangkan perempuan *Nyai*.

Terakhir gelar seorang kiai diberikan kepada orang yang ahli agama Islam. Dengan demikian kiai identik dengan ulama. Sebab, keduanya sama-sama berperan sebagai sosok ilmuwan sekaligus pengajar agama. Dalam ajaran Islam sendiri, kiai dan ulama mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan peran yang penting dalam kehidupan umat, agama dan bangsa. Secara garis besar, peran itu berupa tugas pencerahan bagi umat manusia sesuai dengan kedudukannya sebagai para pewaris nabi. Tugas pencerahan moral para kiai dan ulama merupakan bagian dari tugas '*amar ma'ruf nahi munkar*' yang dapat di perinci dalam empat hal yakni *pertama*, mendidik umat di bidang agama. *Kedua*, melakukan kontrol terhadap perbuatan masyarakat. *Ketiga*, memecahkan problem yang terjadi di

masyarakat. *Keempat*, menjadi agen perubahan sosial. Semua tugas itu di jalankan oleh seorang kiai dan ulama sepanjang kehidupannya.

Tetapi semua itu berubah disaat pemilu 2004 yang mana kiai dan ulama, kini mempunyai ketertarikan untuk masuk dan duduk di kursi kekuasaan atau politik. Kiai ikut berperan dalam politik berawal dari para kiai sibuk menerima tamu dari berbagai tokoh elit politik silih berganti ke rumah kiai hanya untuk sowan. Sebab dengan cara ini para calon dalam berbekal label pengakuan para kiai akan mendapatkan suara yang melimpah dari rakyat pemilih.

Sistem pemilu secara langsung ini juga bisa membuat kiai ingin ikut berperan secara pro-aktif. Misalnya, menjadi Tim suksesnya, calon tertentu atau juga kiai tersebut mencalonkan dirinya sebagai kandidat. Fenomena kiai yang terlibat dalam politik demikian berkembang, bedanya di tahun 2009 kiai mobilisasi santrinya dalam partai, secara tidak langsung kiai menunjukkan pada satu partai yakni Partai Kebangkitan Nasional Ulama “PKNU”. Partai ini didirikan oleh seorang kiai dari pondok pesantren Widang Kabupaten Tuban, dan bukan hanya beliau saja yang mendirikan tetapi di bantu dengan tujuh belas ulama untuk mendirikan partai tersebut.

Yang berperan dalam PKNU bukan seorang kiai dan ulama saja tetapi santri-santri dari beberapa kiai yang memiliki pondok pesantren juga dilibatkan. Peneliti mengambil salah satu kasus pada Desa Suci, masyarakat mempercayai seorang kiai yang mendirikan pondok sejak 1975. Beliau mendirikan dengan dukungan seorang guru yang beliau hormati sekali yakni KH. Abdullah Faqih.

Sampai pondok pesantren berkembang dan mendapatkan ribuan santri yang ingin menimba ilmu di pondok pesantren *Mambaus Sholihin*, walaupun KH. Masbuhin Faqih ini sudah menjadi kiai terbesar di Desa Suci, kiai ini masih menyempatkan diri untuk menyambung tali silaturahmi ke gurunya.

Begitu besar sifat *Sam'an Wa Tho'atan*-nya kepada sang guru beliau. Pada tahun 2007 KH. Abdullah Faqih mempunyai tujuan yang akan mendirikan PKNU dengan tujuan untuk mempertahankan *ahlusunnah wal jama'ah* dalam dunia perpolitikan. KH. Masbuhin Faqih ikut serta dalam mendirikan PKNU.

Sebagai seorang kiai melihat realitas yang ada di sekeliling kehidupan pondok pesantren, Seperti halnya kiai pondok pesantren *Mambaus Sholihin* yang ikut serta dalam partai politik. Walaupun bukan kiai dan ulama langsung yang terlibat dalam dunia politik, tetapi kiai ini melibatkan santrinya ke partai politik.

Realitas yang terjadi pada pihak kiai dan santri ini, memiliki pro kontra antara pihak kiai dan pihak santri. Dimana sang kiai menginginkan santrinya sebagai pihak terdekat dari kiai, untuk melibatkan santri menjadi calon legislatif seperti yang telah disarankan oleh KH. Masbuhin Faqih. Tetapi dilain sisi, pihak santri sendiri belum siap jika dirinya menjadi calon legislatif, selain itu santri juga tidak memiliki pengetahuan dasar seputar politik hal ini yang dijadikan alasan utama santri belum siap secara mental untuk bisa terjun ke ranah politik dan santri juga kurang bersedia untuk nama menjadi caleg karena faktor keluarga yang kurang setuju.

Namun hal ini tidak menjadikan alasan untuk mengundurkan diri sebagai calon legislatif. Karena santri lebih memilih untuk mematuhi permintaan sang kiai, dan hal itu yang dijadikan alasan kuat santri. Tujuan kiai melibatkan santrinya dalam partai politik ini, sewajarnya seorang kiai memerintahkan seorang santrinya, karena kiai pondok pesantren tersebut ingin adanya pemimpin penerus nabi Muhammad dan penerus kiai pondok pesantren yang akan menjadi panutan oleh masyarakat setempat.

Pemilu legislatif merupakan salah satu faktor penting bagi upaya terciptanya kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pemilu Legislatif merupakan prosedur yang ditempuh oleh masyarakat demi mendapatkan sebuah keputusan politik, melalui sebuah proses pemilihan yang bersifat kompetisi di antara calon-calon yang mencalonkan diri. Proses ini dilakukan demi mencapai kesepakatan dari seluruh masyarakat yang ikut memberikan suaranya, dimana suara terbesar akan menjadi DPRD Kab. Gresik, dan DPR Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan pemilu Legislatif merupakan salah satu mekanisme yang tepat untuk memfasilitasi para calon Legislatif untuk bersaing menjadi DPRD Kab Gresik dan DPR Provinsi Jawa Timur terpilih. Sebuah rekrutmen politik berarti merujuk pada proses pemilihan seseorang atau sekelompok santri yang ikut menyuarakan PKNU sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya.

Dewasa ini sosok kiai lebih dikenal sebagai seorang ulama penerus budaya keislaman yang mulai saat ini sudah terkikis sedikit demi sedikit oleh arus politik dan kebudayaan yang sudah jauh dari landasan ajaran-ajaran agama islam.

Fenomena ini memunculkan banyak asumsi yang telah berkembang di kalangan masyarakat dalam memandang dan menilai figur kiai, apalagi ketika sang kiai tersebut ikut terjun dan terlibat politik yang syarat dengan intrik dan konflik didalamnya.

Mobilisasi sosial yang terjadi dari pengembangan atau modernisasi. Sistem pendidikan Islam di pesantren telah menumbuhkan suatu sistem budaya yang lebih rasional dan fungsional santri di kalangan pondok pesantren. Modernisasi pendidikan pesantren paling tidak dapat diamati dari masuknya sistem kurikulum yang diterapkan dan di berlakukan pada pondok pesantren ini. Tak hanya pendidikan formal tetapi pendidikan informal pun juga diterapkan dalam pengajaran pondok pesantren ini. Pendidikan formal yang dijalankan dalam sistem pendidikan di pesantren ini, yang hanya memuat ilmu-ilmu agama secara statis hal ini juga berlaku pada sistem pengajaran yang diberikan.

Sistem pengajaran informal yang diterapkan di pesantren ini dilembagakan dalam bentuk madrasah. Pengajaran informal yang terbentuk dimulai dari tingkat dasar hingga tingkat atas. Dalam sistem kurikulum pengajaran baru yang telah diterapkan pesantren. Hal ini tidak berarti menghilangkan sama sekali unsur sistem pengajaran yang terdahulu. Namun, jelas dengan arus modernisasi yang menerpa dunia pendidikan di pondok pesantren telah membawa banyak perubahan arus pemikiran dari sistem rasional menjadi sistem lebih dinamis.

Realitas yang telah dijelaskan peneliti diatas, ketika sang kiai melibatkan santrinya dalam PKNU. Fenomena dimana santri yang dimobilisasi oleh kiai

dalam partai politik, yang mana politik menurut kiai bukanlah ajang untuk mencari kekuasaan dan kekayaan semata, melainkan misi khusus yakni mengobarkan panji-panji Islam ke seluruh lapisan masyarakat.

Dengan pendekatan fenomenologi dapat memberikan peluang bagi peneliti untuk menyesuaikan dasar peneliti tentang apa yang diamati, didengar dan dilihat dari obyek peneliti. Kiai mobilisasi santri dalam PKNU pemaknaan tersebut, tentu di daari atas seperangkat pengetahuan metode yang dapat di pertanggung jawabkan, yang dalam hal ini berdasarkan seperangkat teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Fenomenologi mampu menjelaskan suatu fenomena yang memusatkan perhatiannya kepada aktor, dan kenyataan yang ada, serta memperhatikan atau mengikuti perubahan dalam proses sosial. Dari fenomena yang sudah terlihat mengenai KH. Masbuhin Faqih sebagai mobilisasi santri dalam PKNU. Peneliti menganalisis bahwa kegiatan seorang kiai yang memobilisasi santri dengan cara kiai menunjuk santrinya secara langsung. Padahal kiai adalah pengasuh pondok pesantren dan mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada santrinya, santri pun juga sebagai penerus kiai dan mengamalkan ilmu-ilmu yang di peroleh santri dari kiainya. Akan tetapi dengan berkembangnya waktu pada tahun 2004. Kiai pondok pesantren sudah terlibat dalam politik, walaupun itu tidak secara langsung.

Realitas yang demikian memiliki dampak lain, yang semakin kuat posisi seorang kiai dalam lingkungan santri. kiai tersebut bisa dikatakan kiai yang benar-

benar mendukung santrinya dalam satu partai yakni PKNU, bahkan kiai mematuhi dawuh gurunya untuk mempertahankan Ahlisunnah Wal Jama'ah.

Kemunculan kiai yang melibatkan santri dalam partai yang memberikan kesempatan untuk turut membangun, memperjuangkan kesejahteraan bersama orang Ahlisunnah Wal Jama'ah tanpa mengharap imbalan apapun, dan kiai pun sudah terpicat dengan partai lain. Dengan alasan-alasan itulah kiai sebagai aktor yang melakukan tipifikasi terhadap santri yang di mobilisasi. Oleh sebab itu KH. Masbuhin Faqih melibatkan santri dalam partai guna untuk mempertahankan orang Ahlisunnah Wal Jama'ah di dalam dunia perpolitikan di partai politik yang didirikan oleh pengasuh pondok pesantren Langitan.

Fenomena seperti ini yang disebutkan dalam unsur pokok yang ada di teori fenomenologi. Bahwa kiai disini berusaha memposisikan santrinya ikut dalam partai politik dengan tujuan mempertahankan Ahlisunnah Wal Jama'ah karena yang mendirikan PKNU terdapat beberapa kiai sepuh dan para habib yang tak diragukan lagi *kewira'ian* beliau. Fenomena yang menjadi peran seorang aktor sebagai kiai yang bersikokohnya melibatkan santri dalam partai, yakni bentuk partisipasi kiai dalam partai yang didirikan oleh para ulama dan kiai, dengan pandangan kiai terhadap partai politik serta motif atau orientasi santri terjun dalam partai politik.

Dengan teori fenomenologi tersebut dapat terlihat jelas bahwa tingkat realitas sosial sebenarnya berbentuk skema konseptual, dengan pertimbangan-pertimbangan dalam menjelaskan suatu fenomena yang telah dianalisis peneliti di

atas menjelaskan bahwa suatu realitas sosial dalam kehidupan seorang kiai, yang berawal dari hakikatnya sebagai seorang pengasuh pondok dan santri-santrinya sekarang berkembang menjadi seorang yang melibatkan santri pada PKNU.

B. Proses Santri Menjalani Amanat Kiai Dalam Partai Politik

Santri sebagai murid yang mengikuti pendidikan di pondok pesantren, Panggilan Santri adalah seorang yang pernah lulus dari Pondok Pesantren. Dimana para santri berdiam diri dalam sebuah asrama bersama sang guru atau kiai dalam beberapa lama untuk memperdalam ilmu keagamaan. Dengan kata lain, bisa saja orang yang sudah pernah mondok di pesantren tidak disebut santri, karena prilakunya buruk. Dan sebaliknya, orang yang tidak pernah mondok di pesantren bisa disebut santri karena prilakunya yang baik.

Yang mana dulunya santri hanya sebagai pendakwah penerus ulama tetapi dengan adanya perubahan zaman globalisasi. Globalisasi sendiri yakni sebuah masa dimana manusia terhubung tanpa melihat batas teritorial Negara. Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap kehidupan santri. Dapat dilihat juga dari segi komunikasi, yang sudah mulai bertebaran alat komunikasi di genggamannya santri era global ini. Dengan adanya alat komunikasi tentunya semakin mudah santri untuk berhubungan dengan orang lain, termasuk dengan lawan jenisnya.

Dari alat komunikasi santri bisa berjuang sebagai bagian dari panggilan tugas. Setelah berjuang, mereka kembali menjalankan aktifitas sehari-hari di

pesantren, di masjid, di masyarakat. Seperti halnya santri pondok pesantren *Mambaus Sholihin* yang mana santri menjalankan amanat seorang guru untuk ikut dalam pemilu legislatif dengan cara kiai tersebut menunjuk secara langsung. Tetapi amanat seorang kiai bukanlah amanat yang ringan bagi santri, bahkan santri pun menolak amanat kiai dengan alasan tidak adanya tekad yang kuat untuk mendukung PKNU dan tidak adanya ridho dari orang tua santri. Dengan bekal *sam'an wa tho'atan* dan kiai bermusyawarah dengan *handai taulan* dan bersikukuhnya kiai untuk mencalonkan santri-santrinya dalam pemilu legislatif, akhirnya keluarga dari santri tersebut menyetujui dan meresmikan anak beliau menjadi seorang calon legislatif.

Pada titik ini cukup jelas, bahwa era globalisasi dan modernisasi politik telah melahirkan kesadaran baru yang bersifat positif bagi kaum santri. Dalam dunia politik tidak lengkap jikalau mereka tidak melibatkan pandangan dan perilaku politik di komunitas muslim. Terutama mereka mengenal para kiai mereka sebagai ajang perpolitikan. Tetapi kiai pondok pesantren tersebut melibatkan santrinya dalam dunia politik hal ini bertujuan sebagai pengganti kiai tersebut. Santri pun melakukan perintah kiai juga dengan sangat hati-hati karena santri yang di libatkan dalam politik sebagai pemimpin negara dan amanat kiai ini sangat berat bagi santri. Walaupun perintah dan tanggung jawab yang diberikan kiai ini sangat berat menurut santri, hal yang demikian membuat santri untuk berusaha sekeras mungkin agar tidak mengecewakan kiai dan masyarakat sekitar.

Bahwasannya perpolitikan seorang muslim memang di butuhkan dalam dunia politik yang semakin memburuk seperti sekarang. Disinilah santri yang

terlibat, maupun tidak terlibat, mereka hanya bisa mengikuti perintah kiai pondok pesantren, hal ini wajar sebagai simbolisasi bentuk kepatuhannya seorang santri terhadap kiai. Sehingga dapat dipahami mengapa terjadi perkembangan rasionalitas pada santri pondok pesantren *Mambaus Sholihin*, dimana mereka menjadi lebih mampu untuk berperan dengan bersumber rasionalitas peran dan fungsi sosialnya.

Dengan pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman yang mereka miliki, yang muncul kemudian adalah cara berfikir yang lebih moderat dan lebih dinamis. Dalam sistem pembelajaran yang berlaku di pondok pesantren *Mambaus Sholihin* tidak lepas dari gebrakan dan sistem perubahan pengajaran dari kiai. Dengan kondisi yang demikian bisa membawa orientasi politik santri pondok pesantren *Mambaus Sholihin*, baik putra maupun putri. Beberapa diantaranya mengaku mempunyai pilihan calon legislatif karena mengetahui tentang kemampuan masing-masing calon kandidat.

Berdasarkan data yang telah di paparkan diatas dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bahwa fenomena yang terjadi pada H. Fadhil, Khoirul Huda, dan Ainur Rofiq tersebut merupakan santri yang dilibatkan oleh KH. Masbuhin Faqih dalam partai politik. Seorang santri yang di libatkan dalam partai politik khususnya di PKNU seharusnya santri tersebut mengabdikan di pondok, tetapi pihak kiai yang mengantarkan H. Fadhil, Khoirul Huda, dan Ainur Rofiq untuk diikuti sertakan dalam caleg pada 2009.

Sebelum adanya fenomena mobilisasi santri sebagai anggota legislatif pada Partai Kebangkitan Nasional Ulama “PKNU”, pastinya ada pertimbangan-pertimbangan yang membawa H. Fadhil, Khoirul Huda, dan Ainur Rofiq bersedia menjadi anggota legislatif 2009 pada PKNU. Pertimbangan tersebut antara lain:

- a. Ridho dari kedua orang tua
- b. Perkataan KH. Masbuhin Faqih, “*wis diniati membantu kiai yang mendirikan PKNU, umpomo dadi, yo..... mugo-mugo ben tambah apik*”
- c. H. Fadhil, Khoirul Huda, dan Ainur Rofiq mempunyai bekal *sam’an wa tho’atan* pada kiai maupun gurunya.

Oleh karena itu peneliti memaparkan pendekatan dengan teori konstruksi sosial. Dimana pendekatan teori ini dapat menganalisis teori konstruksi pada santri yang terlibat pada PKNU seperti, H. Fadhil, Khoirul Huda, dan Ainur Rofiq. Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman bahwa, realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi subyektif dan obyektif. Yang mana manusia sebagai instrumen dalam menciptakan realitas sosial, sedangkan obyektif melalui eksternalisasi.

Konstruksi sosial mampu menjelaskan suatu fenomena yang memusatkan peneliti dan kenyataan yang ada. Dari fenomena yang sudah terlihat bahwa H. Fadhil, Khoirul Huda, dan Ainur Rofiq terlibat dalam partai khususnya dalam PKNU. Peneliti menganalisis bahwa kehidupan santri sehari-hari di lingkungan pondok memiliki dimensi dari kiai sehingga santri yang terlibat bisa menjadi instrumen dalam melibatkan santri ke organisasi sosial seperti, H. Fadhil, Khoirul

Huda, dan Ainur Rofiq yang di mobilisasi oleh kiai pada calon legislatif “caleg” 2009.

Seperti halnya pandangan kiai terhadap santri H. Fadhil, Khoirul Huda, dan Ainur Rofiq, merupakan santri yang mampu menjadi caleg pada 2009 dan kiai merupakan panutan seorang santri dalam pondok pesantren. Teori konstruksi mempunyai tiga tipe bentuk yakni *proses sosial eksternalisasi*, dimana santri yang mengabdikan dirinya pada pondok pesantren untuk mendalami ilmu agama yang cenderung tekstual yang hanya sebatas ilmu Akhlaq, Aqidah dan ilmu Fiqih. Setelah lulus dari pondok pesantren H. Fadhil, Khoirul Huda, dan Ainur Rofiq tidak langsung melepas pengabdianya dari pondok, melainkan mereka mengabdikan dengan cara mengajar di pondok pesantren tersebut. *Proses sosial objektivitas*, yakni realitas yang dialami oleh H. Fadhil, Khoirul Huda, dan Ainur Rofiq merupakan proses interaksi santri dalam PKNU melalui lembaga dan pengakuan dari partai tersebut. Mereka diberi amanat oleh KH. Masbuhin Faqih untuk mencalonkan sebagai calon legislatif. Ada beberapa santri yang tidak aktif dalam partai kurang menyetujui dengan adanya perintah kiai, yang mana kiai tersebut memerintahkan santrinya menggunakan hak pilihnya untuk memilih parpol terutama PKNU “Partai Kebangkitan Nasional Ulama”. Dengan ini di kuatkan oleh informen santri:

*“Saya pribadi kurang setuju, jikalau kiai memberi amanat kepada santri-santri yang tidak terlibat langsung dalam PKNU. Menurut saya amanat yang seperti ini membuat santri merasa terpaksa dalam menentukan pilihannya”.*¹

Sedangkan *Proses sosial internalisasi*, H. Fadhil, Khoirul Huda, dan Ainur Rofiq mengikuti amanat kiaiinya dengan cara mencalonkan diri sebagai caleg di Kabupaten Gresik. Seakan-akan kiai tersebut tidak menunjuk H. Fadhil, Khoirul Huda, dan Ainur Rofiq sebagai caleg secara langsung. Proses keterlibatan santri dalam partai politik ini tetap melibatkan nama pondok pesantren *Mambaus Sholihin*, karena santri yang terlibat dalam PKNU adalah seorang santri yang mengabdikan pada pondok *Mambaus Sholihin* yang terdapat di pertengahan kehidupan masyarakat Desa Suci.

Bukan hanya H. Fadhil, Khoirul Huda, dan Ainur Rofiq saja yang terlibat dalam PKNU, tetapi santri-santri yang lain pun juga terlibat dalam PKNU. Yang membedakan suatu keterlibatan santri H. Fadhil, Khoirul Huda, dan Ainur Rofiq dengan santri yang lain, yakni santri H. Fadhil, Khoirul Huda, dan Ainur Rofiq langsung ikut serta dalam anggota PKNU, sedangkan santri-santri yang statusnya masih mahasiswa atau siswa dalam pondok pesantren *Mambaus Sholihin*.

Mereka mempunyai hak pilih pada caleg 2009, mereka dapat menggunakan hak pilihnya di Kabupaten masing-masing santri. dengan satu syarat santri harus tetap mendukung PKNU walaupun santri menggunakan hak pilihnya di Kabupatennya masing-masing. Sedangkan santri yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, dari pihak pondok pesantren mendaftarkan santri-

¹ Agus, Pengurus Pondok Pesantren Putra Mambaus Sholihin, *Wawancara*, Gresik. 08 Juni 2009

santri tersebut ke kantor KPU Kabupaten Gresik dengan tujuan pihak pondok pesantren memberi peluang bagi santri yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan cara mencoblos di lingkungan pondok sendiri.

Sudut pandang yang dipakai oleh santri yang tidak aktif dalam partai disini sangat menentukan mengenai indikator yang dianggap paling rasional. Beberapa hal yang mendasar mengenai konsep bagaimana *Teori mobilisasi* itu bekerja bahwa setiap individu memiliki makna, yang mana pemaknaan yang berhubungan pada tindakan yang didasarkan oleh pengalaman keseharian yang bersifat *intensional*. Oleh karena itu santri yang tidak aktif dalam caleg 2009 melakukan tindakan sesuai dengan kepentingannya, yang didasarkan atas kepentingan rasional hasil dari analisis masing-masing pribadi (santri yang tidak aktif dalam PKNU).

Dari pemaparan diatas peneliti juga berpendapat bahwa santri menggunakan hak pilihnya dalam caleg 2009 tersebut dilakukan selain karena pertimbangan tersebut, juga memiliki tujuan yang tidak kalah penting, yaitu memberikan benteng moralitas dalam PKNU.

Dalam proses mobilisasi santri ini merupakan suatu kejadian yang mengalir, dimana suatu proses pastilah ada langkah-langkah suatu kegiatan atau pendekatan, dalam hal ini dapat disebutkan langkah-langkahnya dalam proses mobilisasi santri dalam PKNU, antara lain: dari adanya tujuan kiai yang telah disepakati oleh santri dan telah menjadi tujuan yang akan dicapai dalam basis utama PKNU di wilayah Gresik.

Selanjutnya yaitu proses kerelaan sang kiai dengan santri mengikuti segenap kehendaknya dan melayani semua kepentingan kiai tersebut. Kerelaan kiai ini, yang dikenal di pesantren dengan nama barokah, adalah alasan tempat berpijak seorang santri di dalam menuntut ilmu dengan tekanan kebutuhan untuk memperoleh kerelaan kiai inilah diciptakan konsensus dalam pembentukan tata nilai di pesantren.

Dengan pendekatan mobilisasi dapat memberikan peluang bagi peneliti untuk menyesuaikan dasar peneliti untuk menyesuaikan dasar peneliti tentang apa yang diamati dari obyek peneliti. Santri yang menggunakan hak pilihnya untuk mendukung PKNU. Pemaknaan tersebut, tentu di dasari atas seperangkat teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Seperti halnya hasil dari wawancara yakni:

“Sebagai santri di pondok pesantren mana pun pasti mempunyai rasa tunduknya kepada seorang guru, kalau menurut bahasa santri sifat sam’an wa tho’atan pasti ada dalam pondok pesantren mana pun. Jadi jika kiai tersebut memberi amanat atau perintah setidaknya santri itu mengikuti perkataan kiainya.”²

Yang berangkat dari subyek peneliti tersebut dapat di analisis dengan pengalaman dan fenomena yang terlihat oleh kasap mata yang menjelaskan fenomena seorang santri yang menggunakan hak pilihnya untuk tetap mendukung PKNU dapat di identifikasikan, dan kemudian di tarik pada kesimpulan. Secara teoritis memang tidak dapat dikatakan bahwa suatu kondisi santri dapat berakibat secara diamentral yang berlawanan pada partisipasi politik di suatu pihak kiai, dan

² Rofa’atul Laili, Pengurus Pondok Pesantren Putri Mambaus Sholihin, *Wawancara*, Gresik. 08 Juni 2009

kepada mobilisasi politik di latar belakang oleh kepentingan elite kekuasaan akan dukungan santri yang tidak terlibat secara langsung yang menunjukkan kekuasaan sementara.

Adapun faktor yang mengarahkan peneliti menganalisis mobilisasi politik antara lain: kebijakan H. Fadhil, Khoirul Huda dan Ainur Rofiq yang aktif dalam bidang partai politik. Khususnya pemberian dukungan kepada PKNU ini seharusnya menyesuaikan kepribadian dan organisasi yang akan mendukung partai tersebut sepenuhnya. Dimana kepribadian santri satu dengan santri yang lain ini berbeda-beda pendapat, walaupun mereka dalam satu naungan pondok pesantren. Seperti halnya dari hasil wawancara:

“Saya sebagai santri yang kurang setuju, jika kiai langsung menentukan partai yang akan kita pilih yakni PKNU. Sedangkan saya belum tahu begitu mendalam siapa pendiri PKNU. Saya rasa santri lain pun juga belum tahu PKNU yang lebih jelasnya.”³

Dari kepribadian santri yang berbeda pendapat akan memisahkan antara santri yang mendukung PKNU dengan santri yang tidak setuju untuk mendukung PKNU. Tetapi dalam realitas yang ada pada pondok pesantren *Mambaus Sholihin*, tidak ada pemisah antara santri yang mendukung dengan santri tidak sependapat dengan kiai.

³ Agus, Pengurus Pondok Pesantren Putra Mambaus Sholihin, *Wawancara*, Gresik. 08 Juni 2009